

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab II ini akan membahas gambaran umum objek penelitian, yakni majalah *Tempo* dan Soe Hok-gie. *Tempo*, yang merupakan salah satu media massa paling prestisius di Indonesia ini, akan menjadi pembahasan paling awal bab II (yang disertai profil lengkap), sebelum dilanjutkan oleh pembahasan mengenai sosok Soe Hok-gie (yang disertai profil lengkap) .

A. Sejarah Majalah Tempo

Majalah *Tempo* punya sejarah panjang yang terhormat. Majalah ini terbit pada 6 Maret 1971, ketika sederetan para jurnalis muda kreatif dan sejumlah tokoh sastra, yang sempat tergabung di surat kabar mahasiswa *Harian KAMI* dan majalah *Express* milik Burhanuddin Mohammad Diah (1917-1997), berhasil mendapatkan suntikan dana dari para pelaku bisnis Jakarta untuk menerbitkan majalah mingguan yang berkualitas seperti majalah *Time*. Para pendirinya—Goenawan Mohamad, Fikri Djufri, Syu'bah Asa (almarhum), Ed Zoelverdi (almarhum), Yusril Djalinus (almarhum), Lukman Setiawan, Salim Said, dan lainnya—menyebut majalah ini merupakan “eksprimen” pertama atas kerja modal industri pers di negeri ini, di mana para jurnalis memberikan kontribusi lewat hasil kerjanya, sementara penyumbang modal memberikan suntikan modal dan keduanya saling berbagi keuntungan satu sama lain (Hill, 2011: 104).

Penyokong di balik majalah ini adalah PT Grafitti Pers (kini PT Tempo Inti Media, Tbk – pen) dan dikemudikan oleh bukan sembarang orang: Eric Frits Hermanus Samola–bendahara umum Partai Golongan Karya (partai “penguasa” di masa itu – pen)–dan pengusaha perumahan berketurunan Tionghoa, Ir. Ciputra, yang juga direktur perusahaan perumahan PT Pembangunan Djaja (Hill, 2011: 105).

David T. Hill, seorang Indonesianis asal Australia, yang juga penulis buku *Jurnalisme dan Politik di Indonesia : Sebuah Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004): Sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang* (2011), mengungkapkan dalam karyanya, *Pers di Masa Orde Baru* (2011), bahwa gaya kepenulisan *Tempo* memang terinspirasi oleh *Indonesia Raya*, surat kabar yang didirikan oleh Mochtar Lubis pada 1949, terutama di bagian rubrik investigasi (atau dikenal dengan istilah *investigative journalism* atau jurnalisme investigatif). Namun, gaya kepenulisan itu bukanlah yang utama. Majalah ini mengutamakan gaya kepenulisan *literary journalism* atau jurnalisme sastra (atau sastrawi), yang baru diperkenalkan pada awal-awal 1970-an.

“.....karena sebagian besar pendiri majalah ini berasal dari kalangan tokoh sastra, maka peliputannya terkesan seolah-olah “bercerita secara berurutan” (“*to be narrated*”), bukan “melaporkan” (“*to be reported*”) layaknya media massa pada umumnya” (Hill, 2011: 105).

Meskipun “produk” Orde Baru (1966-1998), para pendiri *Tempo*, terutama Goenawan Mohamad (atau yang kita kenal dengan inisial “GM”), lebih “bersikap keras” terhadap “pengekangan pers” di masa itu (Orde Baru, 1966-1998 – pen). Meskipun pula disokong oleh partai penguasa, Partai Golkar, *Tempo*, tanpa mengenal rasa ampun, “memukul telak” dengan menelurkan pemberitaan-pemberitaan negatif yang berkaitan dengan penguasa saat itu, Soeharto (1921-2008). Padahal di masa itu, pemberitaan-pemberitaan negatif “haram” hukumnya ditampilkan buat para penguasa, sebab “kebebasan pers” sudah di bawah kontrol penuh oleh Kementerian Penerangan RI dan jajarannya (kini digantikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI – pen)

Salah seorang pendiri *Tempo* lainnya, yang juga pendiri surat kabar *The Jakarta Post*, Fikri Jufri, mengatakan, “...sejak awal, kami tak berniat menuliskan berita investigasi, karena majalah ini bukan majalah yang berazaskan hukum. Melainkan, majalah berita bergambar. Tetapi, karena terlanjur, ya sudahlah” (Tempo, 2011: 12). Hal senada juga diutarakan oleh GM dalam buku *Cerita di Balik Dapur Tempo: 40 Tahun (1971-2011)* (2011), yang ditulis untuk memperingati hari ulang tahun majalah prestisius ini yang ke-40 (Tempo, 2011: 9-10).

Bermula pada awal-awal dekade 1970-an, ketika pengusaha berketurunan Tionghoa, Robby Tjahjadi, ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, karena “...berhasil menyelundupkan puluhan mobil mewah dari Eropa, antara lain Rolls-Royce, ke dalam negeri dan berhasil melobi para “orang dalam” hingga dipasarkan di dalam negeri”. Inilah akar berita jurnalisme

investigasi pertama *Tempo* pada awal 1970-an, sebelum akhirnya menelurkan berita skandal paling heboh sepanjang dekade 1970-an: “Skandal Pertamina”. Jurnalisme investigatif ala *Tempo* ini ditulis oleh jurnalis senior George Junus Aditjondro (almarhum), yang terkenal dengan karya fenomenalnya, *Gurita Cikeas* (2010), selama lebih dari dua bulan dan hasilnya antara lain ditemukannya 26 “pintu siluman buat penyelundupan mobil-mobil mewah dari Barat”. Aditjondro, dalam *Tempo* edisi Juli 1973, menulis, “.....berbagai kisah nyata tentang *congtipu*, uang semir, cak-kopi, selundup, dan biaya siluman yang bisa bergeser dari meja verifikasi ke balik pintu WC masih saja terjadi” (Tempo, 2011: 12-13).

Dua tahun kemudian, sekitar pertengahan-akhir 1975-an, *Tempo* kembali melakukan liputan investigasi terkait perusahaan milik negara, PT Pertamina, yang saat itu dipimpin oleh “orang kedua” Soeharto, Ibnu Sutowo. Laporan inilah yang mengawali akar jurnalisme investigatif *Tempo* hingga sekarang. Pada November 1975, Fikri Jufri, ketika itu wakil pemimpin redaksi *Tempo*, ditugaskan untuk meliput Siswono Yudho Husodo (kini Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat – pen) sekaligus mewawancarai pengusaha muda yang tengah naik daun itu. Ketika hendak diwawancarai Fikri, ekspresi muka Sis–panggilan akrab Siswono–mendadak berubah. Fikri lantas bertanya-tanya. “Ada apa, Bung?”, ucapnya. Siswono membalas, “Direktur Utama PT Pertamina dan lima direktornya diberhentikan.” Sontak, redaktur senior *Tempo* ini girang bukan main. “Ini berita besar. Dan harus segera diliput”, ucapnya berkelakar saat ditemui *Tempo*, pertengahan 2011 lalu (Tempo, 2011: 16-18).

Liputan investigatif mengenai PT Pertamina sudah pernah dilakukan ketika perusahaan itu masih bernama PT Permina pada dekade 1960-an oleh surat kabar *Indonesia Raya* pimpinan Mochtar Lubis (Hill, 2011: 134-136). Ketika itu, skandal besar ini belum mengemuka dan berbanding jauh dengan hasil liputan investigatif *Tempo* kurun akhir 1975 hingga pertengahan 1976 (Tempo, 2011: 16-18).

Jurnalisme investigatif *Tempo* “menelurkan” beberapa liputan investigatif sepanjang 1971 hingga sekarang, di antaranya liputan tenggelamnya Kapal Motor Tampomas II di perairan Kepulauan Masalembu, Jawa Timur, 27-29 Januari 1981 hingga “skandal besar” kapal perang bekas Jerman Timur oleh Kementerian Riset dan Teknologi sekaligus pemberitaan “adu-domba” antara Menteri Riset dan Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden ke-3 RI, 1998-1999 dan Wakil Presiden RI, 1993-1998) dan Menteri Keuangan Mari’e Muhammad (1993-1998) mengenai kapal perang eks Jerman Timur tersebut pada 1994 (Tempo, 2011: 22-27 dan 29-34).

Dan, (liputan) terbaru adalah liputan investigatif tentang IndonesianLeaks, situs jejaring–dan organisasi bawah tanah–milik sekumpulan jurnalis Indonesia, salah satunya dari *Tempo*, yang meliput kasus “buku merah” yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Tempo, 2018: 70-72 dan 74-75).

“Buku merah” tersebut diduga berisi daftar para petinggi Indonesia (yang salah satunya menyebut dari institusi kepolisian – pen) dalam kasus korupsi yang menyeret pengusaha Basuki Hariman dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi–

sekaligus mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia–Patrialis Akbar pada 2017 lalu serta dimuat dalam laporan *Tempo* sepanjang Oktober 2018 (*Tempo*, 2018: 70-72 dan 74-75).

Sejak berdiri pada 1971 hingga sekarang, setidaknya majalah ini pernah mengalami masa-masa pembredelan, yakni 1974, 1978, 1982 dan 1994. Pada 1974, *Tempo* “dibredel” akibat pemberitaan negatif tentang kasus Malapetaka 15 Januari (Malari) yang dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat Jakarta ketika kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia, 15-16 Januari 1974 silam dan “pembredelan” kedua terjadi pada 1978 silam saat meliput rencana program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menteri P&K) Daoed Joesoef (almarhum) (*Tempo*, 1986: 85-86 dan 91-92. Keterangan: *garis miring* dan “tanda kutip” bukan artian dibredel, tetapi diberi peringatan oleh Kementerian Penerangan terkait dua liputan *Tempo* tersebut – pen).

Pembredelan yang sesungguhnya justru terjadi pada 1982 dan 1994, ketika *Tempo* meliput dua kasus besar: liputan kerusuhan kampanye Partai Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta saat masa-masa kampanye Pemilihan Umum 1982, 18 Maret 1982 (dan baru “terbit” kembali sekitar dua bulan kemudian, 15 Mei 1982) dan liputan skandal kapal perang eks Jerman Timur hingga “adu-domba” Menristek B.J. Habibie dan Menkeu Mari’e Muhammad yang terbit pada edisi 11-16 Juni 1994. Pembredelan pada 1994 berhasil mematikan *Tempo* sebagai satu-satunya media massa yang selalu mengkritik pemerintah Orde Baru (1966-1998) dengan fakta dan data di lapangan (*Tempo*, 2011: 52-55 dan 29-34).

Pembredelan *Tempo* pada 1994 bukanlah akhir dari segala perjuangan majalah “produk” Orde Baru (1966-1998) itu. Kurun pertengahan 1990-an, *Tempo* bergerak di bawah tanah melalui situs dalam jaringan (*online*) dan kerap bersua dengan aparat keamanan. Perjuangan ini berbuah manis saat edisi *online* milik *Tempo*, *Tempo Interaktif* (kini www.tempo.co), bergerak leluasa di bawah tanah, di bawah komando Yusril Djalinus dan kawan-kawan “tersisa” *Tempo*. Berbeda dengan versi cetaknya yang berhasil “dimatikan” pada 1994, versi *online* ini tak mudah dibungkam karena rezim saat itu belum “melek teknologi dan informasi” hingga *Tempo* terbit kembali pada 1998 dan sampai sekarang tetap eksis di dunia jurnalistik, baik dalam bentuk media cetak maupun *online* (*Tempo*, 2011: 56-59).

Selain majalah, *Tempo* juga mengeluarkan edisi cetak lainnya, *Koran Tempo* (surat kabar) pada 2001, serta dua “saudara”, *U-Magazine* (pria dewasa) dan *Travelounge* (pariwisata) pada 2007 dan 2010. Dua “saudara” itu masing-masing dipimpin oleh salah seorang anggota redaksi majalah *Tempo*; dan *Koran Tempo* dipimpin juga oleh salah seorang anggota redaksi majalah *Tempo*. *U-Magazine*, majalah yang berusia 11 tahun itu, bergerak di bidang hiburan khusus pria dewasa, meskipun ada beberapa wanita dewasa yang tetap menginginkan untuk membacanya. Sedangkan, *Travelounge*, majalah yang didirikan atas kerja sama dengan PT Angkasa Pura II, menyajikan berita-berita eksklusif terkait dunia pariwisata. Meski keduanya sama-sama menyandang nama *Tempo*, *Koran Tempo* dan majalah *Tempo* tetap memberikan rasa yang “berbeda dalam penyajian berita” (*Tempo*, 2011: 108-112 dan 122-124).

Praktik jurnalisme yang “diterapkan” oleh *Tempo* bukanlah jurnalisme investigatif, melainkan jurnalisme sastra (*literary journalism*). Sebab, pernyataan tersebut mengacu pada paragraf ketiga bab III ini,

“...karena sebagian besar pendiri majalah ini berasal dari kalangan tokoh sastra, jadi peliputannya terkesan seolah-olah “bercerita secara berurutan” (“*to be narrated*”), bukan “melaporkan” (“*to be reported*”) layaknya media massa pada umumnya” (Hill, 2011: 105).

Menurut Septiawan Santana Kurnia (2002), jurnalisme sastra adalah teknik pelaporan yang dipenuhi dengan gaya penyajian fiksi yang memberikan detail-detail potret subjek, yang secara sengaja diserahkan pada pembaca untuk dipikirkan, digambarkan, dan ditarik kesimpulannya. Pembaca disuruh mengimajikan tampakan fakta-fakta yang telah dirancang jurnalis dalam urutan adegan, percakapan, dan amatan suasana (Kurnia, 2002: 16-17).

B. Profil Majalah *Tempo*

Nama : Tempo

Nama Usaha : PT Tempo Inti Media Tbk

Berdiri : 6 Maret 1971

Jenis Usaha : Jurnalistik (Pers)

Alamat :

a. Alamat Redaksi : Jalan Palmerah Barat no. 8 Jakarta Selatan, 12210
Telepon (021-7255625), 3916160, 5482132; E-mail: red@tempo.id

b. Alamat Perusahaan : Jalan Palmerah Barat no. 8 Jakarta Selatan, 12210
Telepon (021-5360409); Faks. 5439569; Website:
<http://korporat.tempo.co>

Pemimpin Redaksi : Arif Zulkifli (sekaligus Penanggung Jawab)

Redaktur Eksekutif : Budi Setyarso

Redaktur Senior : Amarzan Loebis, Bambang Harymurti, Edi Kustiadi M.,
Fikri Jufri, Goenawan Mohamad, Leila S. Chudori, Putu Setia, dan Toriq Hadad



Gambar 2.1 Logo Majalah *Tempo* (1971-1994 dan 1998-sekarang) (sumber: www.image.google.com)



Gambar 2. 2 Logo Majalah *Tempo* dengan penambahan tagline “Enak Dibaca dan Perlu” (1998-sekarang) (sumber: www.image.google.com)

C. Biografi Soe Hok-gie

Jikalau kita hidup (dan besar) pada awal 2000-an atau ke atas, kita akan mengetahui nama Soe Hok-gie di mana saja. Mulai dari artikel-artikel di surat kabar, majalah, atau tabloid hingga siaran televisi atau radio. Nama Hok-gie mulai berdentung keras pada pertengahan 2000-an, ketika film berjudul *Gie* (2005), garapan *duo* sineas Indonesia, Mira Lesmana dan Riri Reza, tayang perdana dan menghebohkan di dunia perfilman dalam negeri. Film yang (sebagian besar) diambil dari catatan harian miliknya itu memang bukan film yang amat sangat singkat pembuatannya. Butuh waktu hampir lima tahun bagi Mira dan Riri, *duo* sineas film *Gie*, untuk membuat film bertema *semi-biopic* itu.

Ia bukan sembarang orang. Ia adalah sosok yang “berada” di balik layar ketika terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa sepanjang 1966, menentang aksi kudeta Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada 30 September-1 Oktober 1965. Aksi itu tentunya bukan sekedar sembarang aksi. Hok-gie tak sendiri. Rekan-rekan satu angkatan juga ikut bersuara. Rekan-rekan—yang kelak dikenal dengan sebutan “Tokoh ’66”—yang terlibat demonstrasi besar-besaran kurun 1966 itu (sebagian besar dari mereka) pada akhirnya pernah

“duduk” di lingkup pemerintahan (birokrasi)—sesuatu yang amat sangat dibenci oleh Hok-gie dan dianggap “penjilat” semata selepas “berjuang atas nama rakyat”—dan beberapa dari mereka pernah menjadi akademisi, sastrawan, bahkan jurnalis (atau wartawan).

Soe Hok-gie lahir di Jakarta, 17 Desember 1942 dari pasangan Soe Lie-piet dan Nio Hoei-an serta memiliki empat saudara kandung: dua kakak perempuan yang masing-masing bernama Dien dan Mona; kakak laki-laki yang bernama Soe Hok-djin—yang kelak mengikuti jejak sang adik dan dikenal dengan nama Arief Budiman; serta adik perempuan yang bernama Jeanne Sumual (Tempo, 2016: 62-63; Sutrisno-Bekti, 2009: 209-219). Ayahnya, Lie-piet, adalah jurnalis “pribumi” yang bekerja kurun awal 1920-an hingga awal 1940-an dan bersahabat dekat dengan kakek dan ayah dari Kusumaningrat bersaudara (kelak Purnama dan Hikmat, anak Agus dan cucu Duta, menjadi sahabat Hok-djin dan Hok-gie saat berkuliah di Universitas Indonesia kurun 1960-an – pen), Duta dan Agus Kusumaningrat, ketika bekerja di harian *Sin-Po* pada 1920-an hingga 1930-an (Tempo, 2016: 62-63; Sutrisno-Bekti, 2009: 209-219).

Meskipun lahir dan besar di lingkungan Tionghoa yang boleh dikatakan “secara ekonomi berkecukupan”, namun Hok-gie tak pernah mengeluh. Karena Lie-piet bekerja sebagai jurnalis dan gajinya saat itu boleh dikatakan “melebihi gaji anggota Volksraad (Dewan Rakyat, cikal-bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau MPR/DPR – pen) dan karena produk jurnalistik bukan dimiliki oleh pemerintah, melainkan sebagian besar dimiliki oleh swasta, khususnya kaum pribumi”, Lie-piet selalu mengajak keluarganya

menonton film di bioskop tiap akhir pekan, itupun jika Lie-piet tak bertugas sebagai jurnalis. Berkat pendidikan keras dari sang ayah-lah, yang justru menjadi “cambuk” buat Hok-djin dan Hok-gie untuk tetap berjuang keras, meski memiliki perbedaan kelas sosial dari rekan-rekan Tionghoa lainnya (Tempo, 2016: 62-63; Sutrisno-Bekti, 2009: 209-219)

Hok-gie kecil memang dikenal sebagai sosok yang memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi, terlebih saat ia masuk sekolah dasar bersamaan dengan sang kakak, Hok-djin. Berjarak satu tahun lebih muda dari sang kakak, Hok-gie tak mengenal istilah persaudaraan. Yang ada hanya “saling bersaing antara kakak dan adik” ketika duduk di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selepas tamat dari SD (dulu bernama Sekolah Rakjat – pen), Hok-djin (atau Arief Budiman) dan Hok-gie duduk di pendidikan yang (hampir) sama, yakni Sekolah Menengah Pertama–dan Sekolah Menengah Atas–Kanisius. Saat itu, sekolah ini hanya diperuntukkan buat kalangan atas (kelas *elite*), yang beberapa di antaranya Soebandrio (mantan Wakil Perdana Menteri II RI di era Orde Lama, 1959-1965 dan ikut terlibat dalam aksi G30S/PKI – pen). Karena nilainya bagus–meskipun berada di keluarga yang agak berkecukupan–Hok-gie gagal masuk SMP Kanisius dan justru kakaknya-lah, Hok-djin, yang diterima. Hok-gie akhirnya bersekolah di SMP Strada yang juga sekolah Katolik. Selepas SMP, ia bersekolah lagi dengan sang kakak, Hok-djin, di Sekolah Menengah Atas Kanisius dan memiliki minat di jurusan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu sejarah. Sedangkan, Hok-djin justru sebaliknya: ia berminat pada ilmu-ilmu alam (*science*), matematika, dan filsafat (Sutrisno-Bekti, 2009: 209-219).

Ketika menempuh pendidikan di SMA itulah, jiwa empati dan simpatinya mulai tergugah. Sebetulnya, Hok-gie juga hobi menulis dan ia lakukan saat masih menempuh pendidikan SMP. Kelak, catatan-catatan hariannya dikumpulkan dan dijadikan buku dengan judul *Catatan Seorang Demonstran* (1983, penyunting: Daniel Dhakidae, LP3ES). Ia juga kerap mengirimkan tulisan-tulisannya yang dikatakan “terlalu tinggi” ke majalah sekolah. Salah satu catatan hariannya yang paling berkesan adalah ketika ia menuliskan,

“Kamis, 10 Desember 1959. Siang tadi ketika aku momong (merawat – pen) kera, aku bertemu seorang (bukan pengemis) yang tengah memakan kulit mangga. Rupanya ia kelaparan. Inilah salah satu gejala yang mulai nampak di ibukota. Dan, kuberikan Rp 2,50 dari uangku (kira-kira sekitar Rp 550,00-Rp 750,00 dalam kurs rupiah sekarang – pen). Uangku hanya Rp 2,50 waktu itu (Rp 15,- uang cadanganku atau sekitar Rp 2500,00 dalam kurs rupiah sekarang – pen).

Ya, dua kilometer dari si pemakan kulit mangga, “paduka” (sebutan terhormat buat Sukarno) kita mungkin lagi tertawa-tawa, makan-makan dengan istri-istrinya yang cantik. Dan kalau melihat gejala pemakan kulit mangga itu, alangkah bangga hatiku. “Kita, generasi kita, ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau. Generasi kita menjadi hakim atas mereka yang dituduh koruptor-

koruptor tua, seperti (nama pejabat-pejabat tinggi – red; namun versi *Tempo*, nama para pejabat itu disebutkan secara jelas – pen). Kitalah yang dijadikan generasi yang akan memakmurkan Indonesia”

(Tempo, 2016: 44-45 dan 64-65; Hok-gie, 1983: 69)

Jiwa empati dan simpatinya makin terasah ketika tajam ia diterima di perguruan tinggi bergengsi saat itu, Universitas Indonesia. Lagi-lagi bersama sang kakak, Hok-djin. Hok-gie lalu diterima di Fakultas Sastra UI (FS-UI, kini Fakultas Ilmu Budaya UI), sedangkan Hok-djin diterima di Fakultas Psikologi UI dan satu angkatan dengan GM alias Goenawan Mohamad (mantan pemimpin redaksi dan redaktur senior *Tempo*) pada 1961. Ketika itu, tahun 1960-an merupakan tahun-tahun penuh dengan pertarungan politik. Tahun-tahun itu, oleh Sukarno, dikenal dengan istilah *vivere pericoloso* (“tahun-tahun yang hidup penuh dengan marabahaya”), karena kedekatan PKI dengan Sukarno pada masa-masa itu, Orde Lama (1959-1965). Profesor Prijono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dari Partai Murba yang kemudian berafiliasi dengan PKI (ayah sutradara Ami Prijono – pen), berpendapat bahwa mahasiswa dilarang berpolitik praktis. Pendapat lain justru dilontarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), Profesor Soemitro Djohadikoesoemo atau yang dikenal dengan “Begawan Ekonomi RI” (ayah kandung pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djohadikoesoemo dan pengusaha-pebisnis Hashim Djohadikoesoemo – pen).

Ia berpendapat bahwa mahasiswa boleh berpolitik praktis asal menaati tata aturan yang telah ditetapkan oleh universitas.

Puncak dari jiwa empati dan simpatinya terhadap kemanusiaan mulai nampak kurun 1960-an, sejak dari ia menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta lulus sekaligus menjadi pengajar (dosen) di FS-UI, hingga meninggal pada usia 26 tahun di Puncak Mahameru (Gunung Semeru – pen), Malang-Lumajang-Probolinggo, Jawa Timur, 16 Desember 1969 (sehari sebelum ia [yang seharusnya] merayakan hari ulang tahun yang ke-27 – pen).

Kawan-kawan satu angkatan dan perjuangan (baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal) ikut bergerak, antara lain Jusuf Kalla (wakil presiden RI, 2004-2009 dan wakil presiden RI petahana, 2014-2019), Boediono (wakil presiden RI, 2009-2014), Goenawan Mohamad dan Fikri Jufri (jurnalis dan redaktur senior *Tempo*), Aristides dan Cornelis Joost “Josie” Katoppo (jurnalis), Cosmas (dan Max) Batubara, Fahmi Idris, Jusuf dan Sofjan Wanandi, hingga rekan “non-politik” dari Mahasiswa Pecinta Alam “Prajnaparamita” FS-UI, Herman Onesimus Lantang (saksi mata kematian Hok-gie di Puncak Mahameru pada 16 Desember 1969 – pen). Ia menggerakkan aksi massa di sepanjang bulan Ramadhan dan permulaan Syawal 1966 setelah salah satu rekannya, Arief Rachman Hakim, tewas tertembak di depan gedung Fakultas Kedokteran UI oleh tentara pada 1966. Gerakan itu juga mendorong Sukarno untuk me-*reshuffle* anggota-anggota kabinet Dwikora-nya yang terlibat dalam aksi G30S/PKI, termasuk tiga “pemimpin” teras utamanya: Menteri P&K Prijono, Wakil Perdana

Menteri I Chairul Saleh, dan Wakil Perdana Menteri II Soebandrio (Tempo, 2016: 50-51 dan 84-85).

Mulanya, aksi itu dilandasi rasa ketidakadilan terhadap pemerintah yang melakukan “aksi sapu-bersih” terhadap sisa-sisa anggota PKI dan *onderbouw*-nya yang terlibat G30S/PKI, termasuk empat “pemimpin” teras PKI: Dipa Nusantara Aidit (tewas pada 22 November 1965 setelah pengejarannya berakhir di Solo), Njoto (dinyatakan “hilang” sejak Desember 1965 sesuai diwawancarai oleh *Asahi Shimbun*), Mohamad Hakim Lukman (ditahan kurun 1966 hingga meninggal pada 1990-an), dan Sjam Kamaruzaman (ditahan kurun 1966 hingga meninggal pada 1990-an; catatan: posisi Sjam ini agak “abu-abu”, sebab dalam makalah milik Benedict “Ben” Anderson, *Cornell Paper*, ia bukan pemimpin utama PKI atau Komite Central, melainkan “pemimpin utama” Biro Khusus alias PKI “ilegal”, versi Njoto). Ia mengutuk aksi “sapu bersih” terhadap anggota PKI itu dengan menulis secara gamblang dari hasil “pengamatan”-nya di Purwodadi, Jawa Tengah dan Bali. Dalam tulisannya, ia menentang aksi “sapu bersih” terhadap sisa-sisa anggota PKI dan *onderbouw*-nya di Purwodadi, Jawa Tengah dan Bali, kurun Oktober 1965 hingga Maret-April 1966 itu dan membandingkannya pada aksi serupa di Uni Soviet kurun 1930-an (sekitar 1936 hingga 1938) dan aksi “Holocaust” terhadap etnis Yahudi Eropa–dan non-Eropa–oleh Nazi Jerman pada 1940-1945.

Rasa ketidakadilan inilah yang justru menjadi “bumerang” buat dirinya, sang kakak, Soe Hok-djin (alias Arief Budiman), dan keluarganya. Kurun 1960-an, ia dituduh sebagai bagian dari PKI, karena etnisnya yang “berbeda” dengan

kebanyakan orang. Hal itu ia rasakan sendiri saat akan melakoni misi pertukaran pelajar-mahasiswa ke Amerika Serikat, Agustus-Desember 1968. Atas “bantuan” jurnalis senior (dan mantan pemimpin redaksi *Sinar Harapan*) Aristides Katoppo, Hok-gie diizinkan berangkat setelah dinyatakan “bersih” dari hal-hal yang berbau PKI (Tempo, 2016: 58-59).

Sepanjang demonstrasi besar-besaran pada 1966, namanya makin dikenal luas di pelbagai kalangan, dari mahasiswa hingga birokrat. Bahkan, beberapa orang “dalam” (sebutan khusus buat kalangan eksekutif pemerintahan) juga ada yang ingin menyingkirkannya, termasuk insiden penyerempetan terhadap dirinya dan Cornelis Joost “Josie” Katoppo (adik kandung Aristides Katoppo) hingga penangkapan dirinya atas tuduhan menggerakkan aksi mahasiswa pada 1966. Dinilai vokal kurun 1966, Hok-gie justru merendah. Ia mengatakan bahwa aksi demonstrasi besar-besaran ini untuk “yang mengatasnamakan wakil rakyat, namun tak menunjukkan sikap wakil rakyat yang sesungguhnya” (“sindiran” terhadap seluruh anggota kabinet Dwikora dan penerusnya, Kabinet Gotong-Royong) (Tempo, 2016: 58-59)

Di mata rekan-rekannya, sosok Hok-gie adalah “seorang idealis murni”. Ia, menurut Herman O. Lantang, adalah sosok yang tepat untuk memimpin gerakan demonstrasi besar-besaran pada 1966 itu lantaran memiliki semangat yang menggelora. Ia memang membenci PKI, namun bukan berarti aksi “sapu bersih” terhadap sisa-sisa anggota partai berlambang “Palu Arit” yang dilakukan “atas nama pembalasan daripada kematian tujuh perwira Angkatan Darat” itu

layak dibenarkan. Hok-gie justru menentang karena berlawanan dengan salah satu sila dari Pancasila, yakni sila ke-2, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Di luar aksi politik, ia justru berkecukupan pada kegiatan pecinta alam, dengan mendirikan kelompok pecinta alam di FS-UI, “Prajnaparamita” (nama ini diambil dari salah satu dewi dalam mitologi Hindu, Prajnaparamita, yang berarti “Dewi Pengetahuan”), pada 1964. Bersama sahabatnya, Herman O. Lantang dan Aristides Katoppo, Hok-gie kerap mengadakan acara pendakian ke beberapa gunung di Jawa, di antaranya Gunung Gede-Pangrango (diabadikan dalam puisinya yang berjudul “Mandalawangi-Pangrango”), Gunung Merapi, hingga gunung tertinggi di tanah Jawa sekaligus tertinggi ketiga di Indonesia, Gunung Semeru (atau Mahameru). Menurut Hok-gie, acara pendakian sekaligus pecinta alam ini berarti “melemaskan segala pikiran setelah berkecukupan pada kegiatan politik di lingkungan universitas, yakni Senat–atau Badan Eksekutif Mahasiswa–FS-UI dan Senat–atau BEM–UI) sekaligus juga untuk bersenang-senang bersama alam dan sekitarnya”.

Namun, tak ada yang menyangka jika kematiannya berakhir ketika ia menjalani kegiatan ini. Pada pertengahan Desember 1969, saat memasuki Lebaran, ia dan rekan-rekan Mapala FS-UI dan Mapala UI, antara lain Abdurrahman (alias Maman; saat itu Ketua Mapala FS-UI), Anton Wijana (alias Wiwiek; koordinator demonstrasi UI-Rawamangun, Jakarta Timur sebelum pindah ke Salemba, Depok, Jawa Barat), dan tiga rekan lain (satu dari Mapala FS-UI; dan dua lainnya dari non-Mapala FS-UI yang ikut atas “desakan” Herman O. Lantang): Rudy Badil (mantan wartawan *Kompas* dan salah satu pentolan grup

lawak Warung Kopi Prambors pada 1970-an, bersama Kasino Hadiwibowo alias Kasino, Nanu Mulyono alias Nanu, dan Wahjoe Sardono alias Dono—yang kemudian dikenal dengan Warung Kopi Dono Kasino Indro/Warkop DKI sekaligus masuknya Indrodjojo Kusumonegoro alias Indro—serta aktif kurun pertengahan-akhir 1970-an hingga pertengahan 1990-an), Dhanvantari “Idhan” Lubis (putra Bachtar Lubis dan keponakan wartawan senior Mochtar Lubis), dan Frederick “Freddy” Lodewijk Lasut, akan melakukan pendakian ke Puncak Mahameru, Malang-Lumajang-Probolinggo, Jawa Timur sekaligus ingin merayakan hari ulang tahun Hok-gie ke-27, 12-19 Desember 1969 (Badil, 2009: 1-3; Badil dan Indro, 2010: 15-62)

Perjalanan dan pendakian ke puncak tertinggi di Pulau Jawa yang berakhir dengan dukacita itu dikisahkan secara lengkap dan detil oleh mantan wartawan *Kompas*, pentolan grup lawak Warkop Prambors serta Warkop DKI, sekaligus sahabat Hok-gie, Rudy Badil, dalam buku *Soe Hok-gieSekali Lagi: Buku Pesta dan Cinta di Alam Bangsaanya* (2009). Nahasnya, pada 16 Desember 1969 siang menjelang sore, Hok-gie dan Idhan Lubis, yang lebih dahulu naik ke puncak, tiba-tiba mengalami kejang-kejang, lalu pingsan. Yang melihat kejadian itu kebetulan Aristides dan Herman, karena tak jauh dari lokasi Hok-gie dan Idhan. Sedangkan Badil, Wiwiek, Freddy, dan Maman sedang menyiapkan masakan di bawah. Seketika itu juga, Tides (panggilan akrab Aristides) dan Herman berteriak ke bawah untuk meminta bantuan pada Hok-gie dan Idhan yang pingsan. Terlambat. Sekitar pukul 14:30-15:30 WIB, Hok-gie dan Idhan sudah dinyatakan meninggal akibat menghirup asap beracun di sekitar puncak.

Nahasnya lagi, bantuan keselamatan pada 1960-an jauh berbeda saat ini, karena minimnya teknologi dan situasi yang jauh berbeda dengan situasi saat ini. Keenamnya terpaksa harus menunggu selama hampir dua pekan untuk mengevakuasi kedua jasad kawannya itu (Badil, 2009: 1-82).

Berkat bantuan warga setempat serta rekan-rekan Top Mountain Strangers-7 (TMS-7, klub pendaki gunung Malang – pen) yang diikuti oleh rekan-rekan FS-UI, proses evakuasi jenazah Hok-gie dan Idhan berjalan cukup mudah. Perjalanan udara yang membawa jenazah Hok-gie dan Idhan dari Malang ke Jakarta (yang sempat transit di Yogyakarta) juga berjalan mulus. Kemudian jenazah keduanya disemayamkan di aula FS-UI, Rawamangun, Jakarta Timur dan dimakamkan di Menteng Pulo, Jakarta Pusat pada 24 Desember 1969 (Badil, 2009: 1-82, 83-94).

Para pelayat, antara lain wartawan senior Mochtar Lubis, Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI (dari Partai Sosialis Indonesia/PSI. Catatan: saat itu sudah dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada awal 1960-an akibat melawan keinginan Bung Besar selama masa-masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965 – pen) Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo (ayahanda calon presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto Djojohadikoesoemo dan pebisnis-pengusaha Hashim Djojohadikoesoemo) hingga Gubernur DKI Jakarta (ketika itu) Ali Sadikin, datang silih berganti untuk memberi ucapan bela sungkawa dan duka cita. Pada 23-24 Oktober 1975, kerangka jasad Hok-gie dipindahkan ke Museum Taman Makam Prasasti, Tanah Abang, Jakarta Pusat sekaligus pula abu jasadnya disebar di sekitar lembah Mandalawangi, Puncak Gede-Pangarango, tempat di

mana Hok-gie kerap merenungi diri untuk melepas penat usai melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik di lingkungan universitas (Badil, 2009: 1-82, 83-94, 95-106).

D. Profil Soe Hok-gie

Nama : Soe Hok-gie (ada yang menulis Soe Hok Gie; dan adapula yang menulis Soe Hok-gie)

Lahir : Jakarta, 17 Desember 1942

Wafat : Gunung Mahameru (Gunung Semeru), Malang-Lumajang-Probolinggo, 16 Desember 1969

Agama : Kristen Katolik (adapula yang menulis Kristen Protestan)

Orangtua : Soe Lie-piet dan Nie Hoei-an

Saudara : Empat (tiga perempuan dan satu laki-laki)

- a. Dien (sekitar 1930-an)
- b. Mona (sekitar 1930-an)
- c. Soe Hok-djin alias Arief Budiman (1941)
- d. Jeanne Sumual (1948)

Pendidikan :

- a. Sekolah Rakjat (atau Sekolah Dasar) (1949-1955)
- b. Sekolah Menengah Pertama Strada (1955-1958)

- c. Sekolah Menengah Atas Kanisius (1958-1961)
- d. Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1961-1969)

Kegiatan :

- a. pendiri dan anggota Mahasiswa Pecinta Alam FS-UI (1964-1968)
- b. anggota Senat FS-UI (1965-1969)
- c. pengajar (dosen) FS-UI (Agustus-Desember 1969)

(Hok-gie, 1983: 58-68; Badil dkk, 2009: 209-219)



Gambar 2. 3 Soe Hok-gie, sekitar awal-pertengahan 1960-an (ketika masih menjadi mahasiswa FS-UI dan terlihat badge UI di saku kirinya)

www.image.google.com



Gambar 2.4

Gambar 2. 4 Soe Hok-gie, sekitar awal-pertengahan 1960-an

(www.image.google.com)